



2025

RENJA

(Rencana Kerja)

BKPSDM
KABUPATEN SUMENEP

KATA PENGANTAR


Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat izin dan ridho-Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep Tahun 2025 dapat diselesaikan. Rencana Kerja ini berpedoman pada Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep serta sistematika penulisannya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Rencana Kerja ini merupakan acuan bagi perangkat daerah kami dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Rencana Kerja yang telah disusun ini belum berarti sempurna tanpa implemmentasi dengan pelaksanaan yang tuntas, komitmen dan motivasi yang kuat dari seluruh jajaran perangkat daerah. Kami sangat mengharapkan masukan dan saran yang sifatnya konstruktif dari semua pihak untuk penyusunan rencana kerja ini.

Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang ikut membantu dan memberikan saran, pendapat serta dukungan dalam penyusunan rencana kerja perangkat daerah tahun 2025.

Sumenep, 28 Agustus 2024

**Pt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN SUMENEP**



ARIF FIRMANTO, S.TP., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19780518 200501 1 010

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan.....	8
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II HASIL EVALUASI TAHUN LALU	12
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	17
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	36
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	39
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	40
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	47
BAB III TUJUAN, DAN SASARAN	49
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	49
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	54
3.3 Program dan Kegiatan	57
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	67
BAB V PENUTUP	82

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2023.....	14
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep	37
Tabel 2.3	Review Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Sumenep	41
Tabel 2.4	Usulan Program/Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Sumenep	48
Tabel 3.1	Keterkaitan Antara Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Sumenep.....	54
Tabel 3.2	Prioritas dan Sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep.....	55
Tabel 3.2.1	Tujuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep	56
Tabel 3.2.2	Sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep	56
Tabel 3.2.3	Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep.....	56
Tabel 3.3	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026	61
Tabel 4.1	Rencana Kerja dan Pendanaan BKPSDM Kabupaten Sumenep Tahun 2025	69



PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah, adalah meliputi:

a. Persiapan Penyusunan;

Persiapan penyusunan renja meliputi :

- 1) Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah;
- 2) Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah;
- 3) Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah;
- 4) Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD.

b. Penyusunan Rancangan Awal;

Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Renja paling lambat minggu pertama bulan Desember. Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah mencakup :

Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Renja paling lambat minggu pertama bulan Desember. Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah mencakup :

- 1) Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah
- 2) Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun lalu

Hasil perumusan rancangan awal Renja Perangkat Daerah, disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat :

- 1) Pendahuluan;
- 2) Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun lalu;
- 3) Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
- 4) Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
- 5) Penutup.

c. Penyusunan Rancangan

Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah tersebut dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah dan Rancangan Renja Perangkat Daerah disampaikan kepada kepala BAPPEDA kabupaten/kota untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD. Rancangan Renja Perangkat Daerah disampaikan paling lambat minggu ketiga bulan Maret. BAPPEDA melakukan verifikasi terhadap rancangan Renja Perangkat Daerah dengan maksud dapat menjamin rancangan Renja Perangkat Daerah sudah selaras dengan rancangan awal RKPD.

D. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;

Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan BAPPEDA dan dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Pembahasan dengan pemangku kepentingan bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah. Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah surat edaran Kepala Daerah diterima. Hasil pembahasan rancangan Renja Perangkat Daerah dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.

E. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah;

Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah, merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD. Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada kepala

BAPPEDA untuk diverifikasi paling lambat 1 (satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan. Verifikasi harus dapat menjamin program, kegiatan dan pagu indikatif Renja Perangkat Daerah selaras dengan peraturan Kepala Daerah tentang RKPD dan Renja Perangkat Daerah lainnya. Dalam hal hasil verifikasi ditemukan hal yang perlu disempurnakan, BAPPEDA menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah untuk disempurnakan dan disampaikan kembali kepada kepala BAPPEDA. Verifikasi seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan akhir Renja Perangkat Daerah.

F. Penetapan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Berangkat dari latar belakang tersebut maka untuk setiap tahun Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep membuat Rencana Kerja Perangkat Daerah (Ranwal RKPD) Tahun 2025 yang merupakan rencana kegiatan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan tahun tersebut.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2020 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 3);
14. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 41 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2022 Nomor 41);
15. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 66 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 66);
16. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 66 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2022 Nomor 20);
17. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 23 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2024 Nomor 23).

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025 disusun dengan maksud :

- 1) Menjabarkan rencana kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia jangka pendek (1 tahun) untuk tahun 2025.
- 2) Merumuskan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan mengacu kepada dokumen perencanaan lainnya serta memperhatikan permasalahan yang ada, untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

b. Tujuan

Tujuan disusunnya Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025 adalah :

- 1) Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam jangka 1 tahun;
- 2) Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- 3) Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan dalam pembangunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep Tahun 2025 disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra

Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai:

- 1) Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;

- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- 3) Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals);
- 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah;
- 5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

- 1) Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
- 2) Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
- 3) Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Kabupaten/Kota (bila sudah dilakukan).

BAB III TUJUAN, DAN SASARAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai :

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.
3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program / kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T-C33

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Bab ini dijelaskan mengenai Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025.

BAB V PENUTUP



HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi sebagai sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep Tahun 2023 didasarkan pada Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026, untuk mengetahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2023 melaksanakan 3 (tiga) Program yaitu :

1. Program Kepegawaian Daerah;
2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia;
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Program tersebut diwujudkan dalam 14 (empat belas) kegiatan dan 40 sub kegiatan yang mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri

Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia bertujuan untuk mengidentifikasi kemampuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan program dan kegiatannya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada Renstra 2021 - 2026. Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja Perangkat Daerah dan pencapaian renstra Perangkat Daerah tahun 2023 disajikan pada tabel 2.1 (T-C.29).

Tabel 2.1 (T-C.29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5 03	KEPEGAWAIAN									
5 03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	100%		100%				
5 03 01 2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	55 Dokumen	5 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	100%	11 Dokumen	44 Dokumen	80%
5 03 01 2,01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	5 Dokumen	20 Dokumen	67%

5	03	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	30 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	5 Dokumen	15 Dokumen	50%
5	03	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	438 orang/bulan	150 orang/bulan	72 orang/bln	72 orang/bln	100%	73 orang/bulan	292 orang/bulan	67%
5	03	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	30 Laporan	10 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100%	5 Laporan	20 Laporan	67%
5	03	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	4 Laporan	67%
5	03	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	2 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	4 Paket	67%
5	03	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	2 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	4 Paket	67%
5	03	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	2 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	4 Paket	67%
5	03	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	2 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	4 Paket	67%
5	03	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	42 Dokumen	14 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	100%	7 Dokumen	28 Dokumen	67%
5	03	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72 Laporan	24 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	48 Laporan	67%

5	03	01	2.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	4 Laporan	67%
5	03	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	150 Unit	92 unit	10 unit	10 unit	100%	14 Unit	100 Unit	67%
5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	4 Laporan	67%
5	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	72 Laporan	24 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	36 Laporan	50%
5	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72 Laporan	24 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	36 Laporan	50%
5	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	72 Laporan	24 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	36 Laporan	50%
5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	3 Laporan	50%
5	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	18 Unit	6 Unit	3 Unit	3 Unit	100%	3 Unit	9 Unit	50%
5	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	12 Unit	4 Unit	2 Unit	2 Unit	100%	2 Unit	6 Unit	50%

5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan Manajemen Kepegawaian	65 %	64%	50%	64,00%	116%	70%	65,63%	101%
5	03	02	2,01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Laporan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	6 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	4 Laporan	67%
5	03	02	2,01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	12 Dokumen	4 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Dokumen	8 Dokumen	67%
5	03	02	2,01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	6 Dokumen	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Dokumen	4 Dokumen	67%
5	03	02	2,01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	6 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	4 Dokumen	67%
5	03	02	2,01	08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	6 Lembaga	2 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	100%	1 Lembaga	4 Lembaga	67%
5	03	02	2,01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	6 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	4 Dokumen	67%
5	03	02	2,01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	6 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	4 Dokumen	67%
5	03	02	2,02		Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Laporan Mutasi dan Promosi ASN	6 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	4 Laporan	67%

5	03	02	2,02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	6 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	4 Dokumen	67%
5	03	02	2,02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	12.000 Dokumen	1.817 Dokumen	2.000 Dokumen	1.131 Dokumen	57%	1.700 Dokumen	4.648 Dokumen	39%
5	03	02	2,02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	6 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	4 Dokumen	67%
5	03	02	2,03		Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah Laporan Pengembangan Kompetensi ASN	6 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	4 Laporan	67%
5	03	02	2,03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	750 Orang	304 orang	121 orang	175 orang	141%	75 Orang	554 Orang	74%
5	03	02	2,03	06	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan	120 Orang	-	20 orang	24 orang	120%	20 Orang	44 Orang	37%
5	03	02	2,03	09	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	6 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	67%
5	03	02	2,03	13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang dibina	500 Orang		278 orang	70 orang	25%	100 orang	170 orang	34%
5	03	02	2,04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Laporan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	6 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	4 Laporan	67%
5	03	02	2,04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	6 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	4 Dokumen	67%

5	03	02	2,04	03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	6 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	4 Dokumen	67%
5	03	02	2,04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	3300 orang	1320 orang	660 orang	892 orang	135%	90 orang	2.302 orang	70%
5	03	02	2,04	05	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	900 orang	350 orang	150 orang	184 orang	123%	150 orang	684 orang	76%
5	03	02	2,04	07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	8.756 orang	8.756 orang	8.756 orang	8.756 orang	100%	500 orang	8.756 orang	100%
5	03	02	2,04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	180 Laporan	34 Laporan	30 Laporan	22 Laporan	73%	30 Laporan	90 Laporan	67%
5	03	02	2,04	09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	180 Dokumen	31 Dokumen	30 Dokumen	29 Dokumen	97%	30 Dokumen	90 Dokumen	50%
5	03	02	2,04	10	Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	6 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Lapoan	4 Laporan	67%
5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN									
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi teknis, manajerial, fungsional, formal dan non formal	50 %	40%	42%	42%	100%	45%	45%	90%
5	04	02	2,01		Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah Laporan Pengembangan Kompetensi teknis ASN	12 Dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	8 Dokumen	67%

5	04	02	2,01	01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	12 Dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	8 Dokumen	67%
5	04	02	2,02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Laporan Sertifikasi, Kelembagaan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	12 Dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	8 Dokumen	67%
5	04	02	2,02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah. Jabatan Pimpinan Tinggi. Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	6 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	4 Laporan	67%

5	04	02	2,02	08	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	6 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	4 Dokumen	67%
---	----	----	------	----	--	---	-----------	-----------	-----------	-----------	------	-----------	-----------	-----

Berdasarkan tabel rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja dan pencapaian Rencana Strategis Tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini dilaksanakan guna menunjang seluruh pelaksanaan kegiatan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Program ini diukur dengan indikator Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor dengan target 100%. Indikator ini dapat tercapai karena adanya komitmen dari sekretariat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam memberikan pelayanan kesekretariatan. Program ini diwujudkan dengan pelaksanaan 7 (tujuh) kegiatan dan 16 (enam belas) sub kegiatan yaitu :

a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan ini didukung dengan pelaksanaan 1 (satu) sub kegiatan yaitu Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang diukur dengan indikator Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan target 5 Laporan dan realisasi 5 Laporan sehingga capaian kinerja 100%. Faktor pendorong keberhasilan kegiatan karena adanya komitmen dari Sekretariat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam menyusun laporan capaian kinerja serta adanya dukungan anggaran APBD Kabupaten Sumenep Tahun 2023.

b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini didukung dengan pelaksanaan 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

- penyediaan gaji dan tunjangan ASN yang diukur dengan indikator Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN dengan target 73 orang/bulan dan realisasi 100% sehingga capaian kinerja 100%. Faktor pendorong keberhasilan kegiatan karena adanya komitmen dari Sekretariat Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam mengelola gaji dan tunjangan ASN dengan sebaik-baiknya serta adanya dukungan APBD 2023.

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang diukur dengan indikator Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun sesuai ketentuan dengan target 5 Laporan dan realisasi 5 Laporan sehingga capaian kinerja 100%. Faktor pendorong keberhasilan kegiatan karena adanya komitmen dari Sekretariat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam menyusun laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah serta adanya dukungan anggaran APBD Kabupaten Sumenep Tahun 2023.

c) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan ini didukung dengan pelaksanaan 1 (satu) sub kegiatan yaitu Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya yang diukur dengan indikator Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan dengan target 1 Paket dan realisasi 1 Paket sehingga capaian kinerja 100%. Faktor pendorong keberhasilan kegiatan karena adanya komitmen dari Sekretariat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam memproses pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya serta adanya dukungan anggaran APBD Kabupaten Sumenep Tahun 2023.

d) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini didukung dengan pelaksanaan 6 (enam) sub kegiatan yaitu :

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang diukur dengan indikator Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan dengan target 1 Paket dan realisasi 1 Paket sehingga capaian kinerja 100%. Faktor pendorong keberhasilan kegiatan karena adanya komitmen dari Sekretariat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam menyediakan

komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor serta adanya dukungan anggaran APBD Kabupaten Sumenep Tahun 2023.

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diukur dengan indikator Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan dengan target 1 Paket dan realisasi 1 Paket sehingga capaian kinerja 100%. Faktor pendorong keberhasilan kegiatan karena adanya komitmen dari Sekretariat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam menyediakan peralatan dan perlengkapan kantor serta adanya dukungan anggaran APBD Kabupaten Sumenep Tahun 2023.
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang diukur dengan indikator Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan dengan target 1 Paket dan realisasi 1 Paket sehingga capaian kinerja 100%. Faktor pendorong keberhasilan kegiatan karena adanya komitmen dari Sekretariat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam menyediakan bahan logistik kantor serta adanya dukungan anggaran APBD Kabupaten Sumenep Tahun 2023.
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang diukur dengan indikator Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan dengan target 1 Paket dan realisasi 1 Paket sehingga capaian kinerja 100%. Faktor pendorong keberhasilan kegiatan karena adanya komitmen dari Sekretariat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam menyediakan barang cetak dan penggandaan serta adanya dukungan anggaran APBD Kabupaten Sumenep Tahun 2023.
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang diukur dengan indikator Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan dengan target 7 dokumen dan realisasi 7 dokumen sehingga capaian

kinerja 100%. Faktor pendorong keberhasilan kegiatan karena adanya komitmen dari Sekretariat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam menyediakan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan serta adanya dukungan anggaran APBD Kabupaten Sumenep Tahun 2023.

- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diukur dengan indikator Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan target 12 laporan dan realisasi 12 laporan sehingga capaian kinerja 100%. Faktor pendorong keberhasilan kegiatan karena adanya komitmen dari Sekretariat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam menyelenggarakan rapat koordinasi dan konsultasi serta adanya dukungan anggaran APBD Kabupaten Sumenep Tahun 2023.

e) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini didukung dengan pelaksanaan 1 (satu) sub kegiatan yaitu Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang diukur dengan indikator Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan dengan target 11 Unit realisasi 10 Unit sehingga capaian kinerja 91%. Sub kegiatan ini tidak tercapai karena harga barang yang mempunyai TKDN mengalami kenaikan sehingga mengurangi volume barang untuk merealisasi pengadaan barang tersebut.

f) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini didukung dengan pelaksanaan 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang diukur dengan indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan target 12 Laporan dan realisasi 12 Laporan sehingga capaian kinerja 100%. Faktor pendorong keberhasilan kegiatan karena adanya komitmen dari Sekretariat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam menyediakan jasa

surat menyurat serta adanya dukungan anggaran APBD Kabupaten Sumenep Tahun 2023.

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan dengan target 12 Laporan dan realisasi 12 Laporan sehingga capaian kinerja 100%. Faktor pendorong keberhasilan kegiatan karena adanya komitmen dari Sekretariat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam menyediakan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik serta adanya dukungan anggaran APBD Kabupaten Sumenep Tahun 2023.
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang diukur dengan indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan dengan target 12 Laporan dan realisasi 12 Laporan sehingga capaian kinerja 100%. Faktor pendorong keberhasilan kegiatan karena adanya komitmen dari Sekretariat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam menyediakan jasa pelayanan umum kantor serta adanya dukungan anggaran APBD Kabupaten Sumenep Tahun 2023.

g) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini didukung dengan pelaksanaan 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diukur dengan indikator Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya dengan target 3 unit dan realisasi 3 unit sehingga capaian kinerja 100%. Faktor pendorong keberhasilan kegiatan karena adanya komitmen dari Sekretariat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam menyediakan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak

kendaraan dinas jabatan serta adanya dukungan anggaran APBD Kabupaten Sumenep Tahun 2023.

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang diukur dengan indikator Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi dengan target 2 unit dan realisasi 2 unit sehingga capaian kinerja 100%. Faktor pendorong keberhasilan kegiatan karena adanya komitmen dari Sekretariat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam pemeliharaan gedung kantor serta adanya dukungan anggaran APBD Kabupaten Sumenep Tahun 2023.

2. Program Kepegawaian Daerah

Program ini diukur dengan indikator kinerja yaitu Persentase Pelaksanaan Manajemen Kepegawaian dari target kinerja yang telah ditetapkan sebesar 50% dan terealisasi 64% sehingga capaian kinerja dengan persentase 128%.

Program ini diwujudkan dengan pelaksanaan 6 (enam) kegiatan yaitu :

1) Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN

Kegiatan ini didukung dengan pelaksanaan 6 (enam) sub kegiatan yaitu :

- ❖ Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN yang diukur dengan indikator Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN dengan target 2 dokumen dan realisasi 2 dokumen sehingga capaian kinerja 100%. Faktor pendorong keberhasilan sub kegiatan ini karena adanya komitmen dari Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi dalam melaksanakan perencanaan kebutuhan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep serta adanya dukungan anggaran APBD Kabupaten Sumenep Tahun 2023.

- ❖ Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK yang diukur dengan indikator Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK dengan target 1 dokumen dan realisasi 1 dokumen sehingga capaian kinerja 100%. Faktor pendorong keberhasilan sub kegiatan ini karena adanya komitmen dari Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi dalam melaksanakan Pelaksanaan Pengadaan ASN Formasi Tahun 2023 dan telah dilaksanakan melalui CAT (Computer Assisted Test). Pelaksanaan seleksi PPPK Formasi 2023 yang dilaksanakan di UNIBA selama 13 hari dari Tanggal 09 s/d 21 November 2023 sebanyak 687.302 peserta yang dibagi per sesi sebanyak 200 peserta yang dilaksanakan sehari 3 sesi dan berjalan dengan Baik serta adanya dukungan anggaran APBD Kabupaten Sumenep Tahun 2023.
- ❖ Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian yang diukur dengan indikator Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian dengan target 1 dokumen dan realisasi 1 dokumen sehingga capaian kinerja 100%. Faktor pendorong keberhasilan sub kegiatan ini karena adanya komitmen dari Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi dalam memproses administrasi pemberhentian pegawai. Tahun 2023 sudah diterbitkan SK Pensiun sebanyak 443 orang, untuk Pensiun Janda/Dua sebanyak 55 serta adanya dukungan anggaran APBD Kabupaten Sumenep Tahun 2023.
- ❖ Fasilitasi Lembaga Profesi ASN yang diukur dengan indikator Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi dengan target 1 Lembaga dan realisasi 1 lembaga sehingga capaian kinerja 100%. Faktor pendorong keberhasilan sub kegiatan ini karena adanya komitmen dari Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi dalam memfasilitasi lembaga profesi ASN serta adanya dukungan anggaran APBD Kabupaten Sumenep Tahun 2023.

- ❖ Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian yang diukur dengan indikator Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian dengan target 1 dokumen dan realisasi 1 dokumen sehingga capaian kinerja 100%. Faktor pendorong keberhasilan sub kegiatan ini karena adanya komitmen dari Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi dalam Penyediaan fasilitas informasi dan komunikasi yang efektif dan efisien melalui website BKPSDM <http://bkpsdm.sumenepkab.go.id>. Penyelenggaraan Sistem Informasi Layanan Harian Kepegawaian (SILAHKAN) serta adanya dukungan anggaran APBD Kabupaten Sumenep Tahun 2023.
- ❖ Pengelolaan Data Kepegawaian yang diukur dengan indikator Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian dengan target 1 dokumen dan realisasi 1 dokumen sehingga capaian kinerja 100%. Faktor pendorong keberhasilan sub kegiatan ini karena adanya komitmen dari Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi dalam mengelola data kepegawaian. Validitas data ASN pada SIMPEG+ telah berhasil mengurangi frekuensi permintaan data ke PD/unit kerja karena pengintegrasian pengelolaan data dan pemanfaatan data telah menjadikannya, sebagai penunjang pengambilan keputusan mutasi kepegawaian. Validitas Peremajaan data pada SAPK telah berhasil mewujudkan Cetak SK CPNS, Kenaikan Pangkat dan usul Pensiun secara online dengan BKN Pusat sejak tahun 2012 yang ditandai dengan adanya barcode pada setiap cetak SKnya dan saat ini SAPK telah berganti menjadi SIASN yang terintegrasi dengan SIMPEG+, serta adanya dukungan anggaran APBD Kabupaten Sumenep Tahun 2023.

2) Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN

Kegiatan ini didukung dengan pelaksanaan 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :

- Pengelolaan Mutasi ASN yang diukur dengan indikator Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi,

Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah dengan target 1 Dokumen dan realisasi 1 Dokumen sehingga capaian kinerja 100%. Faktor pendorong keberhasilan sub kegiatan ini karena adanya komitmen dari Bidang Mutasi dan Promosi dalam pengelolaan mutasi ASN. Tahun 2023 telah dilaksanakan Pelantikan JPT Pratama, Administrator, Pengawas dan Fungsional sebanyak 131 PNS, Mutasi/Promosi Jabatan Struktural/Fungsional sebanyak 355 orang serta adanya dukungan anggaran APBD Kabupaten Sumenep Tahun 2023.

- Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN yang diukur dengan indikator Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN dengan target 2.000 Dokumen dan realisasi 1.131 Dokumen sehingga capaian kinerja 57%. Sub kegiatan ini tidak tercapai karena Penurunan jumlah usulan Kenaikan pangkat akibat dari perubahan aturan, khususnya jabatan fungsional yaitu permenpan 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional. Banyak usulan Kenaikan jenjang jabatan dan kenaikan pangkat jabatan fungsional yang tidak memenuhi syarat.
- Pengelolaan Promosi ASN yang diukur dengan indikator Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN dengan target 1 Dokumen dan realisasi 1 Dokumen sehingga capaian kinerja 100%. Faktor pendorong keberhasilan sub kegiatan ini karena adanya komitmen dari Bidang Mutasi dan Promosi dalam pengelolaan promosi ASN serta adanya dukungan anggaran APBD Kabupaten Sumenep Tahun 2023.

3) Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN

Kegiatan ini didukung dengan pelaksanaan 4 (empat) sub kegiatan yaitu :

- Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN yang diukur dengan indikator Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan dengan target 125 orang dan realisasi 171 orang sehingga capaian kinerja 136%. Faktor pendorong keberhasilan sub kegiatan ini

karena adanya komitmen dari Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur untuk meningkatkan kompetensi ASN dilingkungan Pemkab Sumenep serta adanya dukungan anggaran APBD Kabupaten Sumenep Tahun 2023.

- Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN yang diukur dengan indikator Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan dengan target 20 orang dan realisasi 24 orang sehingga capaian kinerja 120%. Faktor pendorong keberhasilan sub kegiatan ini karena adanya komitmen dari Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur untuk melaksanakan fasilitasi sertifikasi jabatan ASN dilingkungan Pemkab Sumenep serta adanya dukungan anggaran APBD Kabupaten Sumenep Tahun 2023.
- Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional yang diukur dengan indikator Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional dengan target 1 Dokumen dan realisasi 1 dokumen sehingga capaian kinerja 100%. Faktor pendorong keberhasilan sub kegiatan ini karena adanya komitmen dari Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur untuk meningkatkan kompetensi ASN dilingkungan Pemkab Sumenep. Telah dilaksanakan beberapa kegiatan Diklat Teknis Fungsional dengan Pola Kontribusi/mengirim peserta antara lain Diklat Manajemen PPNS Pola 200 JP T.A 2023 , Pelatihan Teknis Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian (Analisis SDM), Diklat Pengelolaan sampah Terpadu dan Limbah Domestik Tahun 2023, Pelatihan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Pertama Angkatan II Tahun 2023, Pelatihan Dasar Fungsional Penyuluh Pertanian Ahli, serta adanya dukungan anggaran APBD Kabupaten Sumenep Tahun 2023.
- Pembinaan Jabatan Fungsional ASN yang diukur dengan indikator Jumlah ASN Fungsional yang Dibina dengan target 278 orang dan realisasi 70 orang sehingga capaian kinerja 25%. Sub kegiatan ini tidak tercapai karena Kurangnya Koordinasi dengan Tim Pembina Jabatan Fungsional.

4) Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

Kegiatan ini didukung dengan pelaksanaan 8 (delapan) sub kegiatan yaitu :

- Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur yang diukur dengan indikator Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur dengan target 1 dokumen dan realisasi 1 dokumen sehingga capaian kinerja 100%. Faktor pendorong keberhasilan sub kegiatan ini karena adanya komitmen dari Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan melaksanakan penilaian kinerja aparatur dilingkungan Pemkab Sumenep serta adanya dukungan anggaran APBD Kabupaten Sumenep Tahun 2023.
- Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur yang diukur dengan indikator Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur dengan target 1 dokumen dan realisasi 1 dokumen sehingga capaian kinerja 100%. Faktor pendorong keberhasilan sub kegiatan ini karena adanya komitmen dari Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan melaksanakan evaluasi hasil penilaian kinerja aparatur dilingkungan Pemkab Sumenep serta adanya dukungan anggaran APBD Kabupaten Sumenep Tahun 2023.
- Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai yang diukur dengan indikator Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan dengan target 660 orang dan realisasi 892 orang sehingga capaian kinerja 135%. Faktor pendorong keberhasilan sub kegiatan ini karena adanya komitmen dari Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan melaksanakan pengelolaan pemberian penghargaan bagi pegawai dilingkungan Pemkab Sumenep serta adanya dukungan anggaran APBD Kabupaten Sumenep Tahun 2023.
- Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai yang diukur dengan indikator Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa dengan target 150 orang dan realisasi 184 orang sehingga capaian kinerja 123%.

Faktor pendorong keberhasilan sub kegiatan ini karena adanya komitmen dari Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan melaksanakan pengelolaan tanda jasa bagi pegawai dilingkungan Pemkab Sumenep serta adanya dukungan anggaran APBD Kabupaten Sumenep Tahun 2023.

- Pembinaan Disiplin ASN yang diukur dengan indikator Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan dengan target 8.756 orang dan realisasi 8.756 orang sehingga capaian kinerja 100%. Faktor pendorong keberhasilan sub kegiatan ini karena adanya komitmen dari Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan melaksanakan pembinaan disiplin bagi pegawai dilingkungan Pemkab Sumenep serta adanya dukungan anggaran APBD Kabupaten Sumenep Tahun 2023.
- Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN yang diukur dengan indikator Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN dengan target 30 laporan dan realisasi 22 laporan sehingga capaian kinerja 73%. Faktor pendorong keberhasilan sub kegiatan ini karena adanya komitmen dari Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan melaksanakan pembinaan disiplin bagi pegawai dilingkungan Pemkab Sumenep sehingga adanya penurunan pelanggaran disiplin pegawai serta adanya dukungan anggaran APBD Kabupaten Sumenep Tahun 2023.
- Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai yang diukur dengan indikator Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani dengan target 30 Dokumen dan realisasi 29 dokumen sehingga capaian kinerja 96%. Faktor pendorong keberhasilan sub kegiatan ini karena adanya komitmen dari Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan melaksanakan konseling bagi pegawai dilingkungan Pemkab Sumenep sehingga terbukti dengan adanya penurunan perceraian pegawai serta adanya dukungan anggaran APBD Kabupaten Sumenep Tahun 2023.

- Evaluasi Disiplin ASN yang diukur dengan indikator Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN dengan target 1 Laporan dan realisasi 1 Laporan sehingga capaian kinerja 100%. Faktor pendorong keberhasilan sub kegiatan ini karena adanya komitmen dari Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan melaksanakan monitoring dan evaluasi disiplin pegawai dilingkungan Pemkab Sumenep serta adanya dukungan anggaran APBD Kabupaten Sumenep Tahun 2023.

3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Program ini diukur dengan indikator kinerja yaitu Persentase ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi teknis, manajerial, fungsional, formal dan non formal dari target kinerja yang telah ditetapkan sebesar 42% dan terealisasi 42% sehingga capaian kinerja dengan persentase 100%.

Program ini diwujudkan dengan pelaksanaan 2 (dua) kegiatan yaitu :

1) Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis

Kegiatan ini didukung dengan pelaksanaan sub kegiatan yaitu : Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang diukur dengan indikator Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun dengan target 2 Dokumen dan realisasi 2 Dokumen sehingga capaian kinerja 100%. Faktor pendorong keberhasilan sub kegiatan ini karena adanya komitmen dari Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur dalam menyusun rencana kebutuhan pengembangan kompetensi baik melalui jalur pendidikan maupun jalur pelatihan dari seluruh ASN di dilingkungan Pemkab Sumenep serta adanya dukungan anggaran APBD Kabupaten Sumenep Tahun 2023.

2) Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

Kegiatan ini didukung dengan pelaksanaan 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

- Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan yang diukur dengan indikator Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan dengan target 1 Laporan dan realisasi 1 Laporan sehingga capaian kinerja 100%. Faktor pendorong keberhasilan sub kegiatan ini karena adanya komitmen dari Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur dalam melaksanakan kegiatan Diklat Pelatihan Kepemimpinan Nasional TK. II, Administrator dan Pengawas dengan Pola Kontribusi/mengirim kemitraan dengan BPSDM Provinsi Jawa Timur, serta Orientasi PPPK di dilingkungan Pemkab Sumenep serta adanya dukungan anggaran APBD Kabupaten Sumenep Tahun 2023.
- Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan yang diukur dengan indikator Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama dengan target 1 Dokumen dan realisasi 1 Dokumen sehingga capaian kinerja 100%. Faktor pendorong keberhasilan sub kegiatan ini karena adanya komitmen dari Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur dalam melakukan monitoring dan evaluasi pengembangan kompetensi pegawai dilingkungan

Pemkab Sumenep serta adanya dukungan anggaran APBD Kabupaten Sumenep Tahun 2023.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				(Tahun n-2) 2022	(Tahun n-1) 2023	(Tahun n) 2024	(Tahun n+1) 2025	(Tahun n+2) 2026	(Tahun n-2) 2022	(Tahun n-1) 2023	(Tahun n n) 2024	(Tahun n+1) 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Indikator Tujuan :												
1	Indeks Profesionalitas ASN			62	64	66	68	70	44,43	83,16	84	85	
2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			89,85	89,90	89,95	89,98	90,00	86,61	86,85	89,95	90	
	Indikator Sasaran :												
1	Indeks Penilaian Sistem Merit			0,45	0,50	0,55	0,60	0,65	0,65	0,64	0,70	0,72	
2	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah			91,00	92,00	93,00	94,00	95,00	113,44	109	≥ 90	≥ 90	

Berdasarkan tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN tahun 2023 ditetapkan 64 dan terealisasi 83,16 dengan capaian indikatornya sebesar 129,94%. Realisasi ini merupakan hasil pengukuran untuk tahun 2022 yang baru dikeluarkan oleh BKN pada Bulan Oktober 2023 sebagaimana yang tertuang dalam Surat dari BKN Kanreg II Surabaya Nomor : 664/B-AK.04/SD/KR.II/2023 tanggal 25 Oktober 2023. Untuk Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023 belum tersedia. Meningkatnya Nilai IP ASN karena dipengaruhi salah satu Dimensi Kompetensi, Kualifikasi dan Kinerja yang mengalami Kenaikan secara signifikan hal ini menunjukkan bahwa ASN di Lingkungan Pemkab Sumenep profesional.
2. Untuk Indikator Kinerja Indeks Penilaian Sistem Merit tahun 2023 ditetapkan 0,50 dan terealisasi 0,64 dengan Capaian Indikatornya sebesar 128%. Realisasi ini Berdasarkan Hasil Penilaian Sistem Merit dilakukan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara, hal ini sesuai dengan Keputusan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor : 260/KEP.KASN/ C/XI/2023 tentang Penetapan Kategori, Penilaian dan Indeks Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep. Untuk mencapai target kinerja diatas, pada tahun 2023 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep telah melakukan beberapa upaya dalam mengungkit kinerja yang diharapkan. Berikut tabel upaya-upaya yang dimaksud antara lain :

Tabel 3.3
Upaya-Upaya Dalam Peningkatan Sistem Merit

No.	ASPEK	Upaya Yang Telah di Lakukan
1	Perencanaan Kebutuhan	Data kepegawaian dikelola online melalui SIMPEG secara real time
2	Pengadaan	Pengadaan ASN telah dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif
3	Pengembangan Karier	Membangun Talent pool untuk JPT, Administrator dan Pengawas
4	Promosi dan Mutasi	Telah melaksanakan pengisian JPT, Administrator dan Pengawas secara terbuka dan kompetitif dengan metode Assessment

5	Manajemen Kinerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh pegawai telah menyusun kontrak kinerja yang diturunkan dari Rencana Strategis Organisasi; 2. Telah menggunakan metode penilaian kinerja yang obyektif dan terukur bagi seluruh pegawai.
6	Penggajian, Penghargaan, dan Perlindungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil penilaian kinerja sudah menjadi bobot utama dalam pemberian TPP; 2. Mempunyai program untuk pemberian penghargaan bagi pegawai; 3. Mempunyai peraturan kode etik dan kodeperilaku
7	Perlindungan dan Pelayanan	Telah tersedia sistem pelayanan keuangan, pelayanan kepegawaian serta sistem lain yang memudahkan aktifitas pegawai.
8	Sistem Informasi	Telah mempunyai Sistem Informasi Kepegawaian, dan sistem penilaian kinerja berbasis online;

3. Untuk Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah tahun 2023 ditetapkan 89,90 dan terealisasi 86,65 dengan Capaian Indikatornya sebesar 96,61%. Realisasi ini Berdasarkan Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Hasil Evaluasi AKIP Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep Nomor : X.700/ 19821/435.060.5/2023 tanggal 6 September 2023. Indikator ini tidak tercapai karena adanya perubahan pola pengukuran dengan Lembar Kerja Evaluasi yang lebih detail dan banyak kriteria-kriteria baru sehingga ada beberapa dokumen dan laporan yang tidak bisa terpenuhi.
4. Untuk Indikator Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah tahun 2023 ditetapkan 92,00 dan terealisasi 109 dengan Capaian Indikatornya sebesar 118,48%. Realisasi ini Berdasarkan Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu dan masalah strategis yang menjadi perhatian utama pada tahun rencana 2025 merupakan hasil dari evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan tugas pokok fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep serta permasalahan yang timbul pada tahun-tahun sebelumnya.

Dengan memperhatikan evaluasi kinerja tahun 2023, maka isu strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelayanan administrasi kepegawaian secara digital;
2. Masih terdapatnya penempatan ASN yang kompetensinya tidak sesuai tugas dan fungsi jabatan yang diduduki;
3. Belum optimalnya sistem pengembangan kompetensi pegawai;
4. Evaluasi kinerja ASN belum berlandaskan pada sistem penilaian kinerja berbasis merit sistem;
5. Belum optimalnya sistem pengembangan pola karir pegawai.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dapat dilihat dalam tabel 2.3. berdasarkan tabel tersebut, tidak terdapat perbedaan antara rancangan awal RKPD dengan hasil kebutuhan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep kecuali mengenai pagu penggunaan anggaran namun semua program dan kegiatan sudah terakomodir dalam RKPD Tahun 2025 (T-C.31).

Tabel 2.3 (T-C.31)
Review Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Sumenep

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	BKPSDM Kab. Sumenep	Persentase Pelaksanaan Manajemen Kepegawaian	90%	1.936.798.150	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	BKPSDM Kab. Sumenep	Persentase Pelaksanaan Manajemen Kepegawaian	90%	1.936.798.150	
	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Laporan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	1 Laporan	613.417.750	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Laporan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	1 Laporan	613.417.750	
	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	2 dokumen	16.120.000	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	2 dokumen	16.120.000	
	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 dokumen	305.153.750	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 dokumen	305.153.750	
	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen	30.780.000	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen	30.780.000	
	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	34.540.000	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	34.540.000	
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	152.939.000	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	152.939.000	
	Pengelolaan Data Kepegawaian	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen	73.885.000	Pengelolaan Data Kepegawaian	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen	73.885.000	

Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Laporan Mutasi dan Promosi ASN	1 Laporan	577.386.000	Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Laporan Mutasi dan Promosi ASN	1 Laporan	577.386.000	
Pengelolaan Mutasi ASN	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1 Dokumen	241.945.700	Pengelolaan Mutasi ASN	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1 Dokumen	241.945.700	
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1.000 Dokumen	57.988.700	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1.000 Dokumen	57.988.700	
Pengelolaan Promosi ASN	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	277.451.600	Pengelolaan Promosi ASN	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	277.451.600	
Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Laporan Pengembangan Kompetensi ASN	1 Laporan	403.637.400	Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Laporan Pengembangan Kompetensi ASN	1 Laporan	403.637.400	
Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	75 Orang	150.556.000	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	75 Orang	150.556.000	
Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan	15 orang	106.746.000	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan	15 orang	106.746.000	
Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	1 dokumen	94.166.000	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	1 dokumen	94.166.000	
Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	100 Orang	52.169.400	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	100 Orang	52.169.400	
Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Laporan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Laporan	342.357.000	Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Laporan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Laporan	342.357.000	

	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	26.009.000	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	26.009.000	
	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Laporan	19.339.000	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Laporan	19.339.000	
	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	60 orang	110.406.000	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	60 orang	110.406.000	
	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	150 orang	41.478.000	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	150 orang	41.478.000	
	Pembinaan Disiplin ASN	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	700 orang	76.050.000	Pembinaan Disiplin ASN	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	700 orang	76.050.000	
	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	25 Laporan	45.119.000	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	25 Laporan	45.119.000	
	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	25 Dokumen	9.675.000	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	25 Dokumen	9.675.000	
	Evaluasi Disiplin ASN	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	1 Laporan	14.281.000	Evaluasi Disiplin ASN	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	1 Laporan	14.281.000	
2.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	BKPSDM Kab. Sumenep	Persentase ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi teknis, manajerial, fungsional, formal dan non formal	45%	717.004.900	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	BKPSDM Kab. Sumenep	Persentase ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi teknis, manajerial, fungsional, formal dan non formal	45%	717.004.900	
	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Laporan Pengembangan Kompetensi Teknis ASN	2 dokumen	132.688.700	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Laporan Pengembangan Kompetensi Teknis ASN	2 dokumen	132.688.700	

Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1 Dokumen	37.955.100	Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1 Dokumen	37.955.100	
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	20 Orang	94.733.600	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	20 Orang	94.733.600	
Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Laporan Sertifikasi, Kelembagaan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	1 Laporan	584.316.200	Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Laporan Sertifikasi, Kelembagaan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	1 Laporan	584.316.200	
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	4 Laporan	558.846.500	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	4 Laporan	558.846.500	

	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	2 Dokumen	25.469.700	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	2 Dokumen	25.469.700	
3.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BKPSDM Kab. Sumenep	Persentase terpenuhinyakebutuhan sarana dan prasarana kantor	100%	10.735.344.248	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BKPSDM Kab. Sumenep	Persentase terpenuhinyakebutuhan sarana dan prasarana kantor	100%	10.735.344.248	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, penanggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	8 Dokumen	1.204.000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, penanggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	8 Dokumen	1.204.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	804.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	804.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	400.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	400.000	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5 Laporan	8.889.523.492	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5 Laporan	8.889.523.492	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	73/12 Orang/ bulan	8.889.123.492	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	73/12 Orang/ bulan	8.889.123.492	

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	400.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	400.000	
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Laporan	79.269.045	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Laporan	79.269.045	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	79.269.045	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	79.269.045	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	484.033.475	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	484.033.475	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	33.238.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	33.238.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	205.634.275	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	205.634.275	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	127.921.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	127.921.000	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	20.700.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	20.700.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7 Dokumen	14.780.200	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7 Dokumen	14.780.200	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	81.760.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	81.760.000	

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Laporan	73.028.010	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Laporan	73.028.010	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	73.028.010	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	73.028.010	
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	854.840.456	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	854.840.456	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.475.400	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.475.400	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	434.732.200	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	434.732.200	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	414.632.856	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	414.632.856	
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	353.445.770	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	353.445.770	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit	90.499.470	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit	90.499.470	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	262.946.300	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BKPSDM Kab. Sumenep	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	262.946.300	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Tidak ada program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang diusulkan pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Kabupaten, LSM, Asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD Kabupaten/Kota untuk tahun anggaran 2025.

Tabel 2.4
Usulan Program/Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Sumenep

No	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6	7
	Nihil					



TUJUAN DAN SASARAN

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah juga dilakukan penelaahan Kebijakan Nasional.

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan pembangunan pada tahun 2025 disusun dengan mendasarkan pada tema dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2025 diselaraskan untuk mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045 sebagai “Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”, melalui 5 sasaran visi sebagai berikut:

1. Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju. Pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan menjadi ke-5 terbesar dunia sekitar USD 30.300. Kontribusi PDB maritim mencapai 15,0 persen dan kontribusi PDB industri pengolahan 28,0 persen;
2. Kemiskinan Menuju 0% dan Ketimpangan Berkurang. Tingkat kemiskinan pada kisaran 0,5-0,8 persen, ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun dengan rasio gini 0,377-0,320 dan ketimpangan antar wilayah menurun dengan peningkatan kontribusi PDRB KTI menjadi 28,5 persen;
3. Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat. Penguatan diplomasi internasional dan kepemimpinan global, pengaruh budaya, peran aktif dalam organisasi internasional, serta berkontribusi terhadap penyelesaian isu-isu global. *Global Power Index* masuk ke dalam 15 besar dunia;

4. Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat. Peningkatan kualitas SDM secara merata melalui pendidikan, pelatihan dan pengembangan, sikap dan etos kerja, penguasaan teknologi inovasi dan kreativitas, dan kesehatan diukur dengan HCI. Skor Indeks Modal Manusia menjadi 0,73; dan
5. Intensitas Emisi GRK Menurun Menuju *Net Zero Emission*. Tingkat penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) mencapai 93,5 persen.

Dalam rangka mendukung 5 sasaran visi tersebut, maka diterjemahkan ke dalam 8 Agenda Pembangunan yang perlu dilakukan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Transformasi Sosial;
2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi;
3. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola;
4. Memantapkan Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia;
5. Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi;
6. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan;
7. Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan; dan
8. Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan.

Sesuai dengan RPJMN 2020-2024 dengan Visi "*Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong*".

Sedangkan Misinya antara lain :

- 1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia.
- 2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing.
- 3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan.
- 4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.
- 5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa.
- 6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya.
- 7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga.
- 8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya.
- 9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Sesuai Arahan Presiden bahwa untuk Prioritas Pembangunan sebagai berikut :

- a) Pembangunan Sumber Daya Manusia;
- b) Pembangunan Infrastruktur;
- c) Transformasi Ekonomi;
- d) Penyederhanaan Regulasi dan Penyederhanaan Birokrasi;

Berdasarkan Prioritas Pembangunan Nasional yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep adalah Penyederhanaan Birokrasi.

Di samping arah dan kebijakan makro tersebut, tema yang diangkat dalam RKP Tahun 2025 adalah “**Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**”. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam Prioritas Nasional sebagai berikut:

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru;
 3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi;
 4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas;
 5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri;
 6. Membangun Dari Desa dan Dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan;
 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan;
- dan

8. Memperkuat Penyelaraasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Terkait prioritas Pembangunan Nasional tersebut diatas, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan urusan pemerintahan yang memiliki kewajiban/tugas Membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

Selain memperhatikan tema Pembangunan Nasional, penyusunan Renja juga memperhatikan dan mempertibangkan tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 merupakan tahun kelima pelaksanaan RPJMD Tahun 2019-2025 dengan arah kebijakan pembangunan tahun 2025 yaitu **“Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Mendukung Transformasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan”**. Dengan prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Pengentasan Kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial;
2. Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi;
3. Peningkatan Pelayanan Dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan;
4. Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan;
5. Pembangunan Karakter Masyarakat yang berbasis nilai-nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas;
6. Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, Perkebunan berbasis Kerakyatan;
7. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, BUM desa dan mendorong pemberdayaan Pemerintah Desa;
8. Penyelenggaraan pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi;
9. Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup.

Selain memperhatikan tema Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur, penyusunan Renja juga memperhatikan dan mempertimbangkan tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun 2025. Adapun tema pembangunan Kabupaten Sumenep Tahun 2025, yaitu “**Menguatkan Stabilitas Sosial Ekonomi dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Dasar dan Kebutuhan Dasar Unggul**”.

Dengan prioritas :

1. Pemantapan pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas dan berkarakter serta layanan kesehatan yang mudah dan terjangkau;
2. Pemantapan nilai tambah komoditas unggulan dan daya saing pariwisata, IKM (Industri Kecil Menengah) serta UMKM;
3. Pemantapan Kompetensi Tenaga Kerja yang menyesuaikan kebutuhan pasar;
4. Pemantapan pemerataan Infrastruktur Publik dan Pelayanan Dasar dengan memperhatikan Aspek Daya Dukung Lingkungan;
5. Pemantapan Aksesibilitas Kepulauan dan Daratan untuk pengembangan ekonomi dan pemenuhan kebutuhan dasar;
6. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta penguatan penanganan masalah sosial;
7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang inovatif dan berbasis digital.

Berdasarkan Prioritas Pembangunan Kabupaten Sumenep Tahun 2025 yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep adalah Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang inovatif dan berbasis digital.

Tabel 3.1

Keterkaitan Antara Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Sumenep

RKP	RKPD JAWA TIMUR	RKPD KAB. SUMENEP
TEMA PEMBANGUNAN		
Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Mendukung Transformasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan.	Menguatkan Stabilitas Sosial Ekonomi Dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Dasar Dan Kebutuhan Dasar Unggul.
PRIORITAS PEMBANGUNAN		
Memperkuat Reformasi Politik, hukum, dan Birokrasi, serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan.	Penyelenggaraan pemerintah yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang inovatif dan berbasis digital;.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan Perangkat Daerah adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan merespon isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dirumuskan untuk mendukung peranan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam mewujudkan Sumber Daya Manusia Aparatur yang berkualitas dan profesional, maka tujuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk tahun 2025 yaitu Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Sipil Negara dengan indikator indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara dengan target untuk tahun 2025 adalah 85%. Perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah dan Pohon Kinerja Perangkat Daerah. Bersama ini kami sampaikan penjabaran sasaran daerah ke dalam sasaran Perangkat Daerah sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3.2.
Prioritas dan Sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Sumenep

NO.	PRIORITAS	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran PD (Outcome)
1	2	3	4	5	6
1.	Peningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang inovatif dan berbasis digital	1. Pengembangan Kapasitas Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah	Indeks Profesionalisme Aparatur	Meningkatnya Kualitas Kinerja dan Kompetensi ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep	Indeks Penilaian Sistem Merit
		2. Terwujudnya Birokrasi Yang Akuntabel dan Transparan	Nilai SAKIP	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Tabel 3.2.1
Tujuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Sumenep

No	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Target Kinerja Tujuan PD Tahun 2025
1.	Terwujudnya Profesionalisme Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah	Indeks Profesionalitas ASN	85
2.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	90

Tabel 3.2.2
Sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Sumenep

No	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Kinerja Sasaran PD Tahun 2025
1.	Meningkatnya Kualitas Kinerja dan Kompetensi ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep	Indeks Penilaian Sistem Merit	0,72
2.	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	≥ 90

Tabel 3.2.3
Indikator Kinerja Utama
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Sumenep

No	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja IKU
1.	Indeks Profesionalitas ASN	85
2.	Indeks Penilaian Sistem Merit	0,72
3.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	90
4.	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	≥ 90

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Program dilaksanakan dan dijabarkan dalam beberapa kegiatan dan sub kegiatan. Program Perangkat Daerah merupakan konsep program yang akan disusun dalam RPJMD dan tetap mengacu pada tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Faktor utama yang menjadi pertimbangan dalam penetapan kegiatan dan sub kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep adalah Visi dan Misi Kepala Daerah. Kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan harus sejalan dan dapat mendukung tercapainya visi dan misi tersebut. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan ada faktor yang sangat diperlukan yaitu pendanaan dan peraturan-peraturan yang mendukung tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep. Untuk mewujudkan kegiatan dan sub kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep, didukung dari dana APBD Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2025.

Penyusunan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025 berpedoman kepada konsep Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2021- 2026 yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, kelompok sasaran, indikator kinerja dan pendanaan. Rancangan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2025 akan melaksanakan 3 (tiga) program sebagai berikut:

1. Program Kepegawaian Daerah;
2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia;
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Rencana program tersebut akan diwujudkan dalam 8 (delapan) rencana kegiatan tahun 2025 yaitu sebagai berikut :

1. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN;
2. Mutasi dan Promosi ASN;

3. Pengembangan Kompetensi ASN;
4. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur;
5. Pengembangan Kompetensi Teknis;
6. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional;
7. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
8. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
9. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
10. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
11. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
12. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
13. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dalam rangka penajaman terhadap 13 (tiga belas) rencana kegiatan diatas, maka disusun 41 rencana sub kegiatan yang menjadi fokus pelaksanaan Perangkat Daerah pada tahun 2025, yaitu sebagai berikut :

1. Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN;
2. Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK;
3. Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian;
4. Fasilitasi Lembaga Profesi ASN;
5. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian;
6. Pengelolaan Data Kepegawaian;
7. Pengelolaan Mutasi ASN;
8. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN;
9. Pengelolaan Promosi ASN;
10. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN;
11. Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN;
12. Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional;
13. Pembinaan Jabatan Fungsional ASN;
14. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur;
15. Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur;
16. Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai;
17. Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai;

18. Pembinaan Disiplin ASN;
19. Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN;
20. Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai;
21. Evaluasi Disiplin ASN;
22. Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum;
23. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum;
24. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan;
25. Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan;
26. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
27. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
28. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
29. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya;
30. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
31. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
32. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
33. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
34. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
35. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
36. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
37. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
38. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
39. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;

40. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
41. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan rencana aksi dari Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Program/kegiatan/sub kegiatan ditetapkan Indikator kinerja, target capaian kinerja, serta kebutuhan dana/pagu indikatif, selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.3 (T-C.33).

Tabel 3.3 (T-C.33)
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah					Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
	Kode		Program / Kegiatan/Sub Kegiatan				Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
A.	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
A.	5	03				KEPEGAWAIAN							
I.	5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan Manajemen Kepegawaian	BKPSDM	90%	1.936.798.150	APBD	90%	1.956.166.132
1.	5	03	02	2.01		<i>Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</i>	Jumlah Laporan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	BKPSDM	1 Laporan	613.417.750	APBD	1 Laporan	619.551.928
	5	03	02	2.01	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	BKPSDM	2 dokumen	16.120.000	APBD	2 dokumen	16.281.200
	5	03	02	2.01	0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	BKPSDM	1 dokumen	305.153.750	APBD	1 dokumen	308.205.288
	5	03	02	2.01	0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	BKPSDM	1 Dokumen	30.780.000	APBD	1 Dokumen	31.087.800
	5	03	02	2.01	0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	BKPSDM	1 Lembaga	34.540.000	APBD	1 Lembaga	34.885.400
	5	03	02	2.01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	BKPSDM	1 Dokumen	152.939.000	APBD	1 Dokumen	154.468.390

	5	03	02	2.01	0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	BKPSDM	1 Dokumen	73.885.000	APBD		1 Dokumen	74.623.850
2.	5	03	02	2.02		Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Laporan Mutasi dan Promosi ASN	BKPSDM	1 Laporan	577.386.000	APBD		1 Laporan	583.159.860
	5	03	02	2.02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	BKPSDM	1 Dokumen	241.945.700	APBD		1 Dokumen	244.365.157
	5	03	02	2.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	BKPSDM	1.000 Dokumen	57.988.700	APBD		1.000 Dokumen	58.568.587
	5	03	02	2.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	BKPSDM	1 Dokumen	277.451.600	APBD		1 Dokumen	280.226.116
3.	5	03	02	2.03		Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah Laporan Pengembangan Kompetensi ASN	BKPSDM	1 Laporan	403.637.400	APBD		1 Laporan	407.673.774
	5	03	02	2.03	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	BKPSDM	75 Orang	150.556.000	APBD		75 Orang	152.061.560
	5	03	02	2.03	0006	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan	BKPSDM	15 orang	106.746.000	APBD		15 orang	107.813.460
	5	03	02	2.03	0009	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	BKPSDM	1 dokumen	94.166.000	APBD		1 dokumen	95.107.660
	5	03	02	2.03	0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	BKPSDM	100 Orang	52.169.400	APBD		100 Orang	52.691.094
4.	5	03	02	2.04		Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Laporan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPSDM	1 Laporan	342.357.000	APBD		1 Laporan	345.780.570
	5	03	02	2.04	0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPSDM	1 Dokumen	26.009.000	APBD		1 Dokumen	26.269.090
	5	03	02	2.04	0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPSDM	1 Laporan	19.339.000	APBD		1 Laporan	19.532.390

	5	03	02	2.04	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	BKPSDM	60 orang	110.406.000	APBD		60 orang	111.510.060
	5	03	02	2.04	0005	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	BKPSDM	150 orang	41.478.000	APBD		150 orang	41.892.780
	5	03	02	2.04	0007	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	BKPSDM	700 orang	76.050.000	APBD		700 orang	76.810.500
	5	03	02	2.04	0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	BKPSDM	25 Laporan	45.119.000	APBD		25 Laporan	45.570.190
	5	03	02	2.04	0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	BKPSDM	25 Dokumen	9.675.000	APBD		25 Dokumen	9.771.750
	5	03	02	2.04	0010	Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	BKPSDM	1 Laporan	14.281.000	APBD		1 Laporan	14.423.810
B.	5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi teknis, manajerial, fungsional, formal dan non formal	BKPSDM	47%	717.004.900	APBD		50%	724.174.949
1.	5	04	02	2.01		Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah Laporan Pengembangan Kompetensi Teknis ASN	BKPSDM	2 dokumen	132.688.700	APBD		2 dokumen	134.015.587
	5	04	02	2.01	0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	BKPSDM	1 Dokumen	37.955.100	APBD		1 Dokumen	38.334.651
	5	04	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	BKPSDM	20 Orang	94.733.600	APBD		20 Orang	95.680.936

2.	5	04	02	2.02		Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Laporan Sertifikasi, Kelembagaan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	BKPSDM	1 Laporan	584.316.200	APBD		1 Laporan	590.159.362
	5	04	02	2.02	0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	BKPSDM	4 Laporan	558.846.500	APBD		4 Laporan	564.434.965
	5	04	02	2.02	0008	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	BKPSDM	2 Dokumen	25.469.700	APBD		2 Dokumen	25.724.397
III.	5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	BKPSDM	100%	10.735.344.248	APBD		100%	10.842.697.690
1	5	03	01	2.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, penanggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	BKPSDM	8 Dokumen	1.204.000	APBD		8 Dokumen	1.216.040
	5	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BKPSDM	2 Dokumen	804.000	APBD		2 Dokumen	812.040
	5	03	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BKPSDM	4 Laporan	400.000	APBD		4 Laporan	404.000
2	5	03	01	2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BKPSDM	5 Laporan	8.889.523.492	APBD		5 Laporan	8.978.418.727
	5	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	BKPSDM	73/12 Orang/bulan	8.889.123.492	APBD		79 orang	8.978.014.727

	5	03	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BKPSDM	5 Laporan	400.000	APBD		5 Laporan	404.000
3	5	03	01	2.05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BKPSDM	1 Laporan	79.269.045	APBD		1 Laporan	80.061.735
	5	03	01	2.05	0001	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	BKPSDM	1 Paket	79.269.045	APBD		1 Paket	80.061.735
4	5	03	01	2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	BKPSDM	1 Laporan	484.033.475	APBD		1 Laporan	488.873.810
	5	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	BKPSDM	1 Paket	33.238.000	APBD		1 Paket	33.570.380
	5	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	BKPSDM	1 Paket	205.634.275	APBD		1 Paket	207.690.618
	5	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	BKPSDM	1 Paket	127.921.000	APBD		1 Paket	129.200.210
	5	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	BKPSDM	1 Paket	20.700.000	APBD		1 Paket	20.907.000
	5	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	BKPSDM	7 Dokumen	14.780.200	APBD		7 Dokumen	14.928.002
	5	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BKPSDM	12 Laporan	81.760.000	APBD		12 Laporan	82.577.600
5	5	03	01	2.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BKPSDM	1 Laporan	73.028.010	APBD		1 Laporan	73.758.290
	5	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	BKPSDM	10 Unit	73.028.010	APBD		10 Unit	73.758.290

6	5	03	01	2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BKPSDM	1 Laporan	854.840.456	APBD		1 Laporan	863.388.861
	5	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BKPSDM	12 Laporan	5.475.400	APBD		12 Laporan	5.530.154
	5	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	BKPSDM	12 Laporan	434.732.200	APBD		12 Laporan	439.079.522
	5	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	BKPSDM	12 Laporan	414.632.856	APBD		12 Laporan	418.779.185
7	5	03	01	2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BKPSDM	1 Laporan	353.445.770	APBD		1 Laporan	356.980.228
	5	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	BKPSDM	13 Unit	90.499.470	APBD		13 Unit	91.404.465
	5	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	BKPSDM	2 Gedung	262.946.300	APBD		2 Gedung	265.575.763
JUMLAH TOTAL										13.389.147.298				13.523.038.771



RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Dalam merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu :

1. Mempedomani RKPD Kabupaten Sumenep Tahun 2025 serta Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Sumenep. Dalam hal ini, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep memiliki peran dalam pencapaian tujuan Terwujudnya Profesionalisme Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah dan sasaran Meningkatnya Kualitas Kinerja dan Kompetensi ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep dengan indikator sasaran Indeks Penilaian Sistem Merit;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan dalam rangka pembangunan daerah Kabupaten Sumenep;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan; dan

7. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Rumusan Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025, berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan tersebut, maka rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Program Kepegawaian Daerah;
- 2) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- 3) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program dan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Penjabaran rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel berikut:

TABEL 4.1
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SUMENEP
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PD PENAN GGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						13.389.147.298							12.957.329.031		
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						13.389.147.298							12.957.329.031		
	5.03	KEPEGAWAIAN						12.672.142.398							12.205.986.264		
1,	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	<i>Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor</i>	100 %			100 %	10.735.344.248						100 %	10.204.733.303		
	5.03.01 .2.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penggangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	55 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	8 Dokumen	1.204.000,00	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Kolor	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pen cegahan dan Pembertantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyel enggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatkan Tata Kelola Pem erintahan yang harmonis dan adaptif	BKPSDM	8 Dokumen	2.426.865,00	BKPSDM	
	5.03.0 1.2.01. 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	804.000,00	Kab. Sumenep , Kota Sumenep , Kolor	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pen cegahan dan Pembertantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyel enggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatkan Tata Kelola Pem erintahan yang harmonis dan adaptif	BKPSDM	2 Dokumen	1.288.980,00	BKPSDM	

5.03.0 1.2.01. 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	20 Laporan	4 laporan	4 Laporan	4 Laporan	400.000,00	Kab. Sumenep , Kota Sumenep , Kolor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyel enggaran pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatkan Tata Kelola Pem erintahan yang harmoni dan adaptif	BKPSDM	4 Laporan	1.137.885,00	BKPSDM
5.03.01 .2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	25 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	8.889.523.492,00	Kab. Sumenep , Kota Sumenep , Kolor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyel enggaran pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatkan Tata Kelola Pem erintahan yang harmoni dan adaptif	BKPSDM	5 Laporan	8.469.001.305,00	BKPSDM
5.03.0 1.2.02. 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	72/12 orang/bulan	72/12 orang/bulan	72/12 orang/bulan	73/12 Orang/bulan	8.889.123.492,00	Kab. Sumenep , Kota Sumenep , Kolor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyel enggaran pemerintahan an yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatk an Tata Kelola Pem erintahan yang harmoni dan adaptif	BKPSDM	73/12 Orang/bulan	8.467.667.280,00	BKPSDM
5.03.0 1.2.02. 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	25 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	400.000,00	Kab. Sumenep , Kota Sumenep , Kolor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyel enggaran pemerintah an yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatk an Tata Kelola Pem erintahan yang harmoni dan adaptif	BKPSDM	5 Laporan	1.334.025,00	BKPSDM
5.03.01 .2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	79.269.045,00	Kab. Sumenep , Kota Sumenep , Kolor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyel enggaran pemerintah an yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatk an Tata Kelola Pem erintahan yang harmoni dan adaptif	BKPSDM	1 Laporan	107.788.092,00	BKPSDM

5.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	79.269.045,00	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Kolor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	BKPSDM	1 Paket	76.288.092,00	BKPSDM
5.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 orang	-	-	-	0,00	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Kolor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	BKPSDM	5 orang	31.500.000,00	BKPSDM
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	484.033.475,00	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Kolor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	BKPSDM	1 Laporan	288.137.850,00	BKPSDM
5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	33.238.000,00	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Kolor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	BKPSDM	1 Paket	34.995.345,00	BKPSDM
5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	205.634.275,00	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Kolor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	BKPSDM	1 Paket	75.272.085,00	BKPSDM

5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	127.921.000,00	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Kolor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	BKPSDM	1 Paket	55.891.605,00	BKPSDM
5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	20.700.000,00	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Kolor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	BKPSDM	1 Paket	21.682.500,00	BKPSDM
5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	105 Dokumen	7 Dokumen	8 Dokumen	7 Dokumen	14.780.200,00	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Kolor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	BKPSDM	7 Dokumen	15.166.515,00	BKPSDM
5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	60 Laporan	12 laporan	12 laporan	12 Laporan	81.760.000,00	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Kolor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	BKPSDM	12 Laporan	85.129.800,00	BKPSDM
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	73.028.010,00	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Kolor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	BKPSDM	1 Laporan	148.475.004,00	BKPSDM
5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	50 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	73.028.010,00	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Kolor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	BKPSDM	10 Unit	148.475.004,00	BKPSDM

5.03.01 .2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	854.840.456,00	Kab. Sumenep , Kota Sumenep , Kolor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyel enggaraan pemerintah an yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatk an Tata Kelola Pem erintahan yang harmoni dan adaptif	BKPSDM	1 Laporan	903.977.189,00	BKPSDM
5.03.01 .2.08.0 001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	5.475.400,00	Kab. Sumenep , Kota Sumenep , Kolor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyel enggaraan pemerintah an yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatk an Tata Kelola Pem erintahan yang harmoni dan adaptif	BKPSDM	12 Laporan	12.143.880,00	BKPSDM
5.03.01 .2.08.0 002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	434.732.200,00	Kab. Sumenep , Kota Sumenep , Kolor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyel enggaraan pemerintah an yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatk an Tata Kelola Pem erintahan yang harmoni dan adaptif	BKPSDM	12 Laporan	456.468.810,00	BKPSDM
5.03.01 .2.08.0 004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	414.632.856,00	Kab. Sumenep , Kota Sumenep , Kolor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyel enggaraan pemerintah an yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatk an Tata Kelola Pem erintahan yang harmoni dan adaptif	BKPSDM	12 Laporan	435.364.499,00	BKPSDM
5.03.01 .2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	5 Laporan	1 laporan	1 laporan	1 Laporan	353.445.770,00	Kab. Sumenep , Kota Sumenep , Kolor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyel enggaraan pemerintah an yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatk an Tata Kelola Pem erintahan yang harmoni dan adaptif	BKPSDM	1 Laporan	284.926.998,00	BKPSDM
5.03.01 .2.09.0 001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	25 Unit	3 Unit	8 unit	11 Unit	90.499.470,00	Kab. Sumenep , Kota Sumenep , Kolor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyel enggaraan pemerintah an yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatk an Tata Kelola Pem erintahan yang harmoni dan adaptif	BKPSDM	11 Unit	48.970.950,00	BKPSDM

	5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	262.946.300,00	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Kolor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	BKPSDM	2 Unit	235.956.048,00	BKPSDM
2,	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan Manajemen Kepegawaian	90 %			90 %	1.936.798.150,00						90 %	2.001.252.961	
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Laporan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	5 Laporan	1 laporan	1 Laporan	1 Laporan	613.417.750,00	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Kolor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Aparatur Sipil Negara	1 Laporan	545.781.181,00	BKPSDM
	5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	16.120.000,00	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Kolor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Aparatur Sipil Negara	2 Dokumen	18.443.355,00	BKPSDM
	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	305.153.750,00	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Kolor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Aparatur Sipil Negara	1 Dokumen	321.446.160,00	BKPSDM
	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	30.780.000,00	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Kolor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Aparatur Sipil Negara	1 Dokumen	33.210.555,00	BKPSDM

5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	<i>Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi</i>	5 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	34.540.000,00	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Kolor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Aparatur Sipil Negara	1 Lembaga	36.832.950,00	BKPSDM
5.03.02.2.01.010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian</i>	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	152.939.000,00	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Kolor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Aparatur Sipil Negara	1 Dokumen	57.615.758,00	BKPSDM
5.03.02.2.01.011	Pengelolaan Data Kepegawaian	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian</i>	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	73.885.000,00	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Kolor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Aparatur Sipil Negara	1 Dokumen	78.232.403,00	BKPSDM
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	<i>Jumlah Laporan Mutasi dan Promosi ASN</i>	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	577.386.000,00	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Kolor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Aparatur Sipil Negara	1 Laporan	524.713.560,00	BKPSDM
5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah</i>	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	241.945.700,00	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Kolor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Aparatur Sipil Negara	1 Dokumen	285.989.865,00	BKPSDM

5.03.0 2.2.02. 0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	<i>Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN</i>	5.000 Dokumen	1.131 Dokumen	1.700 Dokumen	1000 Dokumen	57.988.700,00	Kab. Sumenep , Kota Sumenep , Kolor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyel enggaraan pemerintah an yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatk an Tata Kelola Pem erintahan yang harmoni dan adaptif	Aparatur Sipil Negara	1000 Dokumen	75.051.480,00	BKPSDM
5.03.02 .2.02.0 003	Pengelolaan Promosi ASN	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN</i>	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	277.451.600,00	Kab. Sumenep , Kota Sumenep , Kolor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyel enggaraan pemerintah an yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatk an Tata Kelola Pem erintahan yang harmoni dan adaptif	Aparatur Sipil Negara	1 Dokumen	163.672.215,00	BKPSDM
5.03.02 .2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	<i>Jumlah Laporan Pengembangan Kompetensi ASN</i>	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	403.637.400,00	Kab. Sumenep , Kota Sumenep , Kolor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyel enggaraan pemerintah an yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatk an Tata Kelola Pem erintahan yang harmoni dan adaptif	Aparatur Sipil Negara	1 Laporan	545.139.630,00	BKPSDM
5.03.02 .2.03.0 002	Pengelolaan Assessment Center	<i>Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center</i>	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Kab. Sumenep , Kota Sumenep , Kolor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyel enggaraan pemerintah an yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatk an Tata Kelola Pem erintahan yang harmoni dan adaptif	Aparatur Sipil Negara	1 Dokumen	243.484.710,00	BKPSDM
5.03.0 2.2.03. 0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	<i>Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan</i>	500 orang	171 orang	75 orang	75 Orang	150.556.000,00	Kab. Sumenep , Kota Sumenep , Kolor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyel enggaraan pemerintah an yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatk an Tata Kelola Pem erintahan yang harmoni dan adaptif	Aparatur Sipil Negara	75 Orang	25.441.290,00	BKPSDM

5.03.02.2.03.006	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	<i>Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan</i>	100 orang	24 orang	15 orang	15 Orang	106.746.000,00	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Kolor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Aparatur Sipil Negara	15 Orang	114.530.010,00	BKPSDM
5.03.02.2.03.009	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional</i>	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	94.166.000,00	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Kolor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Aparatur Sipil Negara	1 Dokumen	103.499.025,00	BKPSDM
5.03.02.2.03.013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	<i>Jumlah ASN Fungsional yang Dibina</i>	500 orang	70 orang	100 orang	100 Orang	52.169.400,00	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Kolor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Aparatur Sipil Negara	100 Orang	58.184.595,00	BKPSDM
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	<i>Jumlah Laporan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</i>	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	342.357.000,00	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Kolor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Aparatur Sipil Negara	1 Laporan	385.618.590,00	BKPSDM
5.03.02.2.04.002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</i>	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	26.009.000,00	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Kolor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Aparatur Sipil Negara	1 Dokumen	31.297.350,00	BKPSDM

5.03.02 .204.0 003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	<i>Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</i>	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	19.339.000,00	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Kolor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Aparatur Sipil Negara	1 Laporan	29.508.780,00	BKPSDM
5.03.02 .204.0 004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	<i>Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan</i>	1.000 orang	892 orang	90 orang	60 Orang	110.406.000,00	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Kolor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Aparatur Sipil Negara	60 Orang	125.996.745,00	BKPSDM
5.03.02 .204.0 005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	<i>Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa</i>	750 orang	184 orang	150 orang	150 Orang	41.478.000,00	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Kolor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Aparatur Sipil Negara	150 Orang	48.665.715,00	BKPSDM
5.03.02 .204.0 007	Pembinaan Disiplin ASN	<i>Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan</i>	8.962 orang	8.756 orang	500 orang	700 Orang	76.050.000,00	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Kolor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Aparatur Sipil Negara	700 Orang	84.664.335,00	BKPSDM
5.03.02 .204.0 008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN</i>	125 Laporan	25 Laporan	25 Laporan	25 Laporan	45.119.000,00	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Kolor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Aparatur Sipil Negara	25 Laporan	28.832.475,00	BKPSDM

	5.03.02.204.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	125 Dokumen	25 Dokumen	25 Dokumen	25 Dokumen	9.675.000,00	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Kolor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyel enggaraan pemerintah an yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatk an Tata Kelola Pem erintahan yang harmoni dan adaptif	Aparatur Sipil Negara	25 Dokumen	18.989.145,00	BKPSDM
	5.03.02.204.0010	Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	14.281.000,00	Kab. Sumenep , Kota Sumenep , Kolor	DANA TRANSFER UMUM-DAN ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyel enggaraan pemerintah an yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatk an Tata Kelola Pem erintahan yang harmoni dan adaptif	Aparatur Sipil Negara	1 Laporan	17.664.045,00	BKPSDM
	5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						717.004.900,00							751.342.767,00	
1,	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	<i>Persentase ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi teknis, manajerial, fungsional, formal dan non formal</i>	47 %			47 %	717.004.900,00						47 %	751.342.767,00	
	5.04.02.201	Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah Laporan Pengembangan Kompetensi Teknis ASN	10 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	132.688.700,00	Kab. Sumenep , Kota Sumenep , Kolor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyel enggaraan pemerintah an yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatk an Tata Kelola Pem erintahan yang harmoni dan adaptif	Aparatur Sipil Negara	2 Laporan	137.608.590,00	BKPSDM
	5.04.02.201.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	37.955.100,00	Kab. Sumenep , Kota Sumenep , Kolor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyel enggaraan pemerintah an yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatk an Tata Kelola Pem erintahan yang harmoni dan adaptif	Aparatur Sipil Negara	1 Dokumen	34.107.150,00	BKPSDM

5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	<i>Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi</i>	100 orang	-	20 Orang	20 Orang	94.733.600,00	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Kolor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Aparatur Sipil Negara	20 Orang	103.501.440,00	BKPSDM
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	<i>Jumlah Laporan Sertifikasi, Kelembagaan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</i>	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	584.316.200,00	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Kolor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Aparatur Sipil Negara	1 Laporan	498.234.177,00	BKPSDM
5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	<i>Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan</i>	40 Laporan	3 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	558.846.500,00	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Kolor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Aparatur Sipil Negara	4 Laporan	472.789.380,00	BKPSDM
5.04.02.2.02.0008	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama</i>				2 Dokumen	25.469.700,00	Kab. Sumenep, Kota Sumenep, Kolor	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang harmoni dan adaptif	Aparatur Sipil Negara	2 Dokumen	25.444.797,00	BKPSDM

5.04.02 .2.03	Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	-	-	-	-	0,00	Kab. Sumenep , Kota Sumenep , Kolor	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pen cegahan dan Pembertantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyel enggaraan pemerintah an yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatk an Tata Kelola Pem erintahan yang harmonis dan adaptif	Aparatur Sipil Negara	-	115.500.000,00	BKPSDM
5.04.02 .2.03.0 003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	<i>Jumlah ASN Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri</i>				8 Orang	Kab. Sumenep , Kota Sumenep , Kolor	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pen cegahan dan Pembertantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyel enggaraan pemerintah an yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi Peningkatk an Tata Kelola Pem erintahan yang harmonis dan adaptif	Aparatur Sipil Negara	8 Orang	115.500.000,00	BKPSDM
J U M L A H						13.389.147.298							12.957.329.031	



PENUTUP

Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep Tahun 2025 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, subkegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sumenep;
2. Penyusunan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep ini berpedoman pada Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2025 telah termuat dalam Renja. Selain itu, terdapat penambahan output/keluaran kegiatan sebagai mandatori dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah.
3. Penyusunan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep ini juga berpedoman pada RKPD Kabupaten Sumenep Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan;
4. Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep Tahun 2025;

5. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan reviu yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kabupaten Sumenep dengan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Timur; dan
6. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep Tahun 2025.

Selanjutnya program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan stakeholder di Kabupaten Sumenep.

Dengan disusunnya Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep Tahun 2025 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2025.

Sumenep, 28 Agustus 2024

**PIH. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN SUMENEP**



ARIF FIRMAN TO, S.TP., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19780518 200501 1 010